

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGUNGKAPAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY*

**(Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar
Di Bursa Efek Indonesia)**

Muhammad Rijalus Sholihin¹⁾
Harnovinsah²⁾
Yoosita Aulia³⁾

rijalussantri@gmail.com
yoosita.aulia@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh variabel kepemilikan institusi, dewan komisaris independe, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel tersebut, dan memberikan kontribusi dalam bentuk informasi yang bermanfaat bagi investor, pemilik, dan manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan. Pemilihan variabel didasarkan pada teori yang relevan dan referensi hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini. Metodologi penelitian menggunakan metode kuantitatif, jumlah pengamatan sebanyak 106 yang bersumber dari 53 perusahaan selama 2 periode tahunan. Hasil penelitian ini menemukan bahwa variabel kepemilikan institusi, dewan komisaris independe, komite audit, dan ukuran perusahaan ternyata pengaruhnya signifikan terhadap tingkat pengungkapan Corporate Social Responsibility jika dilihat secara simultan, namun jika dilihat secara parsial hanya kepemilikan institusi dan ukuran perusahaan yang memiliki pengaruh signifikan, sedangkan dua lainnya tidak mempunyai pengaruh yang signifikan

Keyword: Agency Theory, CSR, Kepemilikan Institusi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan

Abstract

The problems raised in this study are how the influence of institutional ownership variables, the board of commissioners is independent, the audit committee, and the size of the company on the level of disclosure of Corporate Social Responsibility in maneuvering companies on the Indonesia Stock Exchange. This study aims to analyze the influence of these variable, and contribute in the form of information that is useful for investors, owners, and company management in decision making. The selection of variables is based on relevant theory and references to the results of previous studies related to this study. The research methodology uses quantitative methods, the number of observations as many as 106 sourced from 53 companies over 2 annual periods. The results of this study found that institutional ownership variables, board of commissioners independent, audit committee, and company size turned out to have a significant effect on the level of disclosure of Corporate Social Responsibility when viewed simultaneously, but if viewed partially only institutional ownership and size of the company has a significant influence, while the other two do not have a significant effect.

Keyword: Agency Theory, CSR, Institutional Ownership, Board of Commissioners Independent, Audit Committee, Company Size

PENDAHULUAN

Setiap perusahaan selalu mempunyai upaya untuk menjaga obyektifitas dalam menjalankan bisnis, termasuk dalam menyediakan informasi relevan dengan cara yang mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, sebab perusahaan juga harus dapat mempertanggungjawabkan hasil kinerja secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Perusahaan juga harus melaksanakan tanggung jawab sosial, antara lain peduli terhadap masyarakat dan kelestarian terutama di sekitar perusahaan dengan membuat perencanaan dan pelaksanaan yang memadai. Berbagai masalah yang timbul dan ramai diperbincangkan ditahun ini salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja yang sangat memprihatinkan, belum lagi isu kekeringan disalah kota di Jawa Tengah, akibat berdirinya produksi semen sebagai salah satu perusahaan raksasa di Indonesia.

Timbulnya permasalahan di Indonesia perlu dikaji secara mendalam agar dapat dilakukan pencegahan dan perbaikan yang tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Usaha dari pihak regulasi dalam melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang telah dilakukan dengan menetapkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Aturan pelaksanaan mengenai tanggung jawab sosial telah diterbitkan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999. Ditetapkannya Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), menjadikan CSR

(*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab soial perusahaan yang seblumnya merupakan suatu hal yang sifatnya sukarela berubah menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha. Hal ini menyebabkan pro-kontra antara pemerintah dan pengusaha di Indonesia.

Para pengusaha berargumen bahwa *Corporate Social Responsibility* (CSR) tidak boleh dipaksakan karena sifatnya sukarela dan sudah menjadi bagian dari srategi perusahaan dalam melakukan hubungan sosial dengan lingkungan disekitarnya. Kewajiban atas (*Corporate Social Responsibility*) dianggap melanggar hal asasi manusia (HAM) dan merugikan kepentingan pemegang saham karena akan meningkatkan biaya yang harus dikeluarkan dalam operasional serta dapat menurunkan laba perusahaan. Penurunan laba berdampak pada penurunan jumlah deviden yang diterima pemegang saham dan nilai ekuitas perusahaan. Selain itu, kewajiban CSR (*Corporate Social Responsibility*) akan menimbulkan komplikasi masalah baru yang dianggap merugikan dunia bisnis bagi beberapa perusahaan.

Kepemilikan saham dalam perusahaan sangat mempengaruhi biaya yang harus dikeluarkan untuk CSR (*Corporate Social Responsibility*), sebab semakin tinggi kepemilikan saham dalam suatu perusahaan maka semakin besar pula biaya yang harus ditanggung, begitu juga sebaliknya jika semakin kecil kepemilikan saham dalam suatu perusahaan maka semakin kecil pula komposisi biaya CSR (*Corporate Social Responsibility*) yang akan ditanggung.

Pengungkapan informasi CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam *annual report* merupakan salah satu cara perusahaan dalam membangun, berkontribusi, dan mempertahankan perusahaan dari sisi politis dan ekonomi. Dengan melakukan *social disclosure* perusahaan merasa aktivitas dan

keberadaannya terlegitimasi, kemudian perusahaan berusaha mencari pembenaran dari *stakeholder* dalam menjalankan aktivitas perusahaannya, sebab semakin kuat komposisi *stakeholder* akan semakin besar pula kecenderungan untuk dapat mengadaptasi diri terhadap keinginan *stakeholdernya*.

Dalam CSR (*Corporate Social Responsibility*) di masyarakat perusahaan mempunyai peran yang dapat dilihat dari beberapa kebijakan tentang lingkungan sosial dan mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan, kegiatan akuntansi sosial dilaporkan baik secara internal maupun eksternal perusahaan, dan karyawan perusahaan mendapat dukungan mengikuti pelatihan secara berkesinambungan tentang akuntansi dan lingkungan sosial perusahaan.

Penelitian ini akan menguji apakah *Good Corporate Governance* yang meliputi (kepemilikan institusi, dewan komisaris independen, komite audit), serta ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Teori *Stakeholder*

Stakeholder adalah sistem yang secara eksplisit berbasis pada pandangan tentang suatu organisasi dan lingkungannya, yang kompleks dan dinamis dan saling mempengaruhi antara keduanya. *Stakeholder theory* pada dasarnya merupakan pendekatan berbasis tekanan pasar (*market forces approach*), dimana penyediaan atau penarikan atas sumber ekonomi akan menentukan tipe pengungkapan sosial dan lingkungan pada titik waktu tertentu. Mereka yakin bahwa *Stakeholder theory* mengabaikan pengaruh masyarakat luas terhadap penyediaan

informasi dalam pelaporan keuangan termasuk keberadaan hukum dan regulasi menghendaki adanya pengungkapan informasi tertentu. Teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan melakukan pengungkapan tanggungjawab sosial sebagai upaya untuk memenuhi harapan atau permintaan *stakeholder*. Namun demikian perusahaan tetap melakukan identifikasi atas *stakeholder*, yang mana memiliki pengaruh lebih besar dapat mengganggu kelangsungan hidup perusahaan jika harapannya tidak terpenuhi, maka pengungkapan akan dilakukan oleh *stakeholders* tersebut.

2. Teori Legitimasi

Teori legitimasi mengatakan bahwa organisasi secara terus menerus mencoba untuk meyakinkan bahwa mereka melakukan kegiatan sesuai dengan batasan dan norma-norma masyarakat dimana mereka berada. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995). Ghazali, Imam dan Anis Chairi (2007) menyatakan bahwa yang mendasari teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi.

Pada dasarnya pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan bertujuan untuk memperlihatkan kepada masyarakat aktivitas sosial yang dilakukan oleh perusahaan dan pengaruhnya terhadap masyarakat. Tujuan akhir pengungkapan sosial perusahaan adalah untuk menunjang tujuan utama perusahaan dalam usaha mendapatkan profit maksimum. Lebih jauh lagi legitimasi ini akan meningkatkan reputasi perusahaan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada nilai perusahaan tersebut.

3. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Pertanggungjawaban sosial perusahaan atau yang sering disebut *Corporate Sosial Responsibility (CSR)* adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarela mengintergrasikan perhatian terhadap lingkungan dan sosial kedalam operasinya dan interaksinya dengan *stakeholder*, yang melebihi tanggung jawab organisasi dibidang hukum (Darwin, 2004). Hackston dan Milne (1996) menyatakan bahwa *corporate sosial responsibility* merupakan suatu proses pengkoordinasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan.

Corporate Sosial Responsibility (CSR) adalah wujud dari kepedulian dan sensitifitas perusahaan untuk ikut meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan, serta merupakan bagian dari upaya investasi yang mendukung keberlanjutan dari usaha yang dikembangkan, tak terpisah dari strategi jangka panjang. Pola umum CSR di Indonesia adalah pertama kelompok pemberi dana bantuan, yaitu lembaga filantropi atau lembaga donor dan para penyumbang dana bantuan (*corporate*, dll). Kedua, kelompok perantara yaitu lembaga/organisasi nirlaba yang mengelola dan menyalurkan dana bantuan (*grant-making institution*). Ketiga kelompok penerima dana bantuan yaitu lembaga swadaya masyarakat, dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya yang memperoleh dan memanfaatkan dana bantuan.

Sejumlah riset empiris melaporkan bahwa paling sedikit ada lima keuntungan yang bisa diraih bila perusahaan mempraktekkan CSR secara berkelanjutan. Pertama, profitabilitas dan kinerja keuangan akan semakin kokoh. Kedua, meningkatnya akuntabilitas dan apresiasi positif dari komunitas investor, kreditur, pemasok, dan konsumen. Ketiga,

meningkatnya komitmen, etos kerja, efisiensi dan produktivitas karyawan. Keempat, menurunnya kerentanan gejolak sosial dan resistensi komunitas sekitarnya karena mereka diperhatikan dan dihargai perusahaan. Kelima, meningkatnya reputasi, *corporate branding*, *goodwill (intangible asset)* dan nilai perusahaan dalam jangka panjang (Lako, 2007). Kaplan dan Norton (2004) dan Kotler dan Lee (2005) menyebutkan keuntungan terakhir ini merupakan *the greatest value creator* buat perusahaan dibanding asset-asset *phisik tangible*.

Tanggung jawab perusahaan itu mencakup isu-su seperti lingkungan kerja, hubungan dengan masyarakat sekitar, dan perlindungan terhadap lingkungan. Konsepsi yang menjelaskan CSR sebagai kewajiban asasi korporasi adalah teori akuntabilitas (*corporate accountability*). Dalam perspektif konsep ini, korporasi dituntut bertanggung jawab atas semua konsekuensi yang ditimbulkannya baik sengaja maupun tidak sengaja bagi para *stakeholder* (Dellaportas, 2005)

1. *Good Corporate Governance*

Good Corporate Governance atau yang biasa disingkat GCG sesuai dengan peraturan menteri BUMN PER-01/MBU/2011 yang menjelaskan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika.

Dalam penerapannya yang mengacu pada Peraturan menteri No. PER-01/MBU/2011, terdapat lima prinsip dalam *Good Corporate Governance*, yaitu :

- a. *Transparancy*
Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan kererbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- b. *Accountability*
Kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban organisasi sehingga

pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

c. *Responsibility*

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

d. *Independency*

Keadaan ketika perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan prinsip – prinsip korporasi yang sehat.

e. *Fairness*

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak – hak pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang – undangan

2. Kepemilikan Institusi

Komposisi kepemilikan saham memiliki dampak yang penting pada sistem kendali perusahaan (Andhi, 2002). Tujuan utama perusahaan dalam manajemen keuangan adalah meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran para pemilik atau pemegang saham (Gapensi, 1997). Namun sebagian dalam teori kagenan (*Agency Theory*), perusahaan yang memisahkan fungsi pengelolaan dengan fungsi kepemilikan akan rentan terhadap konflik kagenan, pihak manajemen sebagai agen, mempunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya dan hal ini yang sering menimbulkan konflik dengan pemegang saham sebagai prinsipal. Pada dasarnya konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham.

3. Dewan Komisaris Independen

Board independent atau dewan komisaris independen adalah jumlah dewan komisaris independen dalam perusahaan. Jumlah dewan komisaris independen yang semakin banyak menandakan bahwa dewan komisaris independen melakukan fungsi

pengawasan dan koordinasi dalam perusahaan yang semakin baik.

Dewan komisaris memegang peranan penting dalam perusahaan terutama dalam pelaksanaan GCG. Tuntutan akan transparansi dan independensi terlihat dari adanya tuntutan agar perusahaan memiliki lebih banyak komisaris independen yang mengawasi tindakan-tindakan para eksekutif (Lastanti,2004). Dewan (komisaris) dapat memberikan konsultasi dan nasehat kepada manajemen (dan direksi).

4. Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih dari dewan komisaris perusahaan yang bertanggungjawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen. Dalam lampiran surat keputusan dewan direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. Kep-315/BEJ/06-2000 point 2f, peraturan tentang pembentukan komite audit disebutkan bahwa “komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris Perusahaan tercatat yang anggotanya diangkat dan dihentikan oleh dewan komisaris perusahaan Tercatat melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam pengelolaan Perusahaan Tercatat”. Jika kualitas dan karakteristik komite audit tercapai, maka transparansi pertanggungjawaban manajemen perusahaan dapat dipercaya, sehingga akan meningkatkan kepercayaan para pelaku pasar modal, selain itu tanggungjawab komite audit dalam melindungi kepentingan pemegang saham minoritas dapat meyakinkan investor untuk mempercayakan investasinya terhadap perusahaan.

5. Ukuran Perusahaan

Secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Hal ini berarti semakin besar ukuran perusahaan, program tanggung jawab sosial perusahaan juga semakin

banyak dan akan diungkapkan dalam laporan tahunan (Sembiring 2005).

6. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang sejenis dengan apa yang akan diteliti sudah banyak diteliti sebelumnya, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dan pengambilan hipotesis. Dalam penelitiannya Marisa (2013) menjelaskan *Corporate Social Responsibility* tidak berpengaruh dalam memerikan kinerja keuangan, hal ini disebabkan pengambilan keputusan ekonomi tidak hanya mengandalkan kinerja keuangan.

Penelitian Agatha (2012) menjelaskan menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Selain ukuran perusahaan, *media exposure* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Variabel profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Variabel kepemilikan saham oleh publik dan kepemilikan saham oleh institusi sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Pengungkapan CSR di Indonesia masih tergolong rendah, hal ini dapat diketahui dari tingkat pengungkapan yang hanya sebesar 30%. Selain itu, pengungkapan CSR di Indonesia sebagian besar tertuang menjadi satu dalam laporan tahunan perusahaan. Pengungkapan aktivitas tanggungjawab sosial perusahaan diungkapkan dalam laporan tersendiri yaitu *sustainability report*. Rendahnya tingkat pengungkapan CSR oleh perusahaan publik di Indonesia dikarenakan belum adanya standar nasional dalam penyusunan laporan mengenai kegiatan tanggungjawab sosial. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang bersifat *anecdote evidence* yang dikeluarkan oleh Majalah Akuntan Indonesia tahun 2010.

Margaretha Dita Utari (2014) menjelaskan bahwa perusahaan sub-sektor farmasi di Indonesia belum mengungkapkan tanggung jawab CSR secara luas karena belum adanya *standard* dan aturan yang mengatur pengungkapan CSR pada laporan tahunan dan sanksi yang tegas jika CSR perusahaan tidak diungkapkan. Sedangkan Angel dan Etna (2013) juga menjelaskan bahwa Pengungkapan aktivitas atau tanggung jawab sosial perusahaan perlu dilakukan sebagai wujud tanggung jawab dan bentuk komunikasi perusahaan terhadap para stakeholder-nya mengenai kinerja dan kondisi perusahaan. Undang-undang yang membahas mengenai peraturan CSR di Indonesia, yaitu Peraturan pemerintah no 47 tahun 2012 membahas mengenai kewajiban perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam, diwajibkan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab social perusahaan. Perusahaan yang tidak menjalankan program CSR atau tidak melaporkan tanggungjawab social lingkungan akan dikenai sanksi, tapi hingga sekarang belum ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR dalam laporan tahunan perusahaannya. Hal tersebut yang disinyalir dapat membuat anggapan bahwa CSR hanyalah formalitas bagi perusahaan untuk menggugurkan kewajibannya saja, sedangkan esensi dari CSR tersebut tidak tercapai.

Muhammad Nurkhin (2010) juga menjelaskan bahwa kepemilikan institusional tidak terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Kedua, komposisi dewan komisaris independen dengan proksi prosentase jumlah dewan komisaris independen terbukti signifikan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kerangka Pemikiran

a) Pengaruh Kepemilikan Institusi terhadap Pengungkapan CSR

Sembiring (2003) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Sedangkan Prayogi (2003) menyatakan bahwa semakin besar

persentase kepemilikan publik semakin luas dalam pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan tahunan, sebab perusahaan perusahaan dalam hal ini cenderung lebih mampu mempertimbangkan dalam pemberian manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Menurut Tarjo, 2008 bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai pemegang saham. Hal ini berarti menunjukkan, bahwa kepemilikan institusional menjadi mekanisme yang handal sehingga mampu memotivasi manajer dalam meningkatkan kinerjanya yang pada akhirnya dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Keberadaan investor institusional dianggap mampu menjadi mekanisme *monitoring* yang efektif dalam setiap keputusan yang diambil oleh manajer.

b) Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Pengungkapan Corporate Sosial Responsibility

Charlie Weir, *et al* (2000) menganggap komisaris yang independen sama dengan direktur non-eksekutif. Ada peran yang memediasi hubungan antara manajer, auditor dan pemegang saham. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Sedangkan komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*.

Semakin meningkatnya tekanan pada perusahaan, maka kebutuhan akan dukungan dari luar akan semakin meningkat. Daily dan Dalton (1994) juga menyatakan, bahwa apabila ada resistensi dari Presiden Direktur untuk menerapkan strategi supaya mampu mengatasi kinerja perusahaan yang terus menerus menurun, maka adanya komisaris yang berasal dari luar akan mendorong

pengambilan keputusan untuk melakukan pembenahan dan perubahan. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan bahwa semakin tinggi representasi dewan komisaris dari dalam (*insider board*), maka keterlibatan direksi dalam pengambilan keputusan yang strategis akan semakin rendah (Frysa, 2011).

c) Pengaruh Komite Audit terhadap Pengungkapan CSR

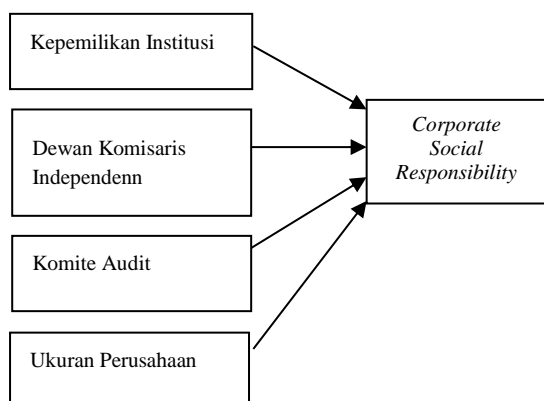
Siallagan dan Machfoedz (2006) menyatakan bahwa investor, analis dan regulator menganggap komite audit memberikan kontribusi dalam kualitas pelaporan keuangan. Hal ini membuktikan keberadaan komite audi secara positif dan signifikan mempengaruhi nilai perusahaan. Komite audit ini merupakan usaha perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan, karena akan menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dengan dewan komisaris maupun pihak ekstern lainnya. Komite audit juga berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan yang bertujuan mewujudkan laporan keuangan yang disusun melalui proses pemeriksaan dengan integritas dan obyektifitas dari auditor. Komite audit akan berperan efektif untuk meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan membantu dewan komisaris memperoleh kepercayaan dari pemegang saham untuk memenuhi kewajiban penyampaian informasi.

d) Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan CSR

Kieso (219:2001) aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh dimasa depan atau dikendalikan oleh etitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Aktiva tetap mempunyai pengaruh positif dengan *leverage*, karena aktiva tetap dapat dipergunakan sebagai jaminan sehingga dapat meminimalkan konflik antara pemegang saham dan kreditur (Megginson, 1997). Dengan demikian, perusahaan yang memiliki lebih banyak aktiva berwujud lebih mampu untuk mengatasi kesulitan keuangan daripada perusahaan yang

memiliki lebih banyak aktiva tak berwujud dan cenderung mampu memberikan manfaat kepada orang-orang dilingkungan perusahaan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik kepentingan antara kreditur dan pemegang saham disebabkan karena pemberi pinjaman menghadapi resiko. Akibatnya mereka menerima adanya jaminan. Menurut Rajan dan Zingales (1995) berpendapat bahwa aktiva tetap perusahaan dapat dipergunakan sebagai jaminan yang akan mengurangi resiko bagi pihak yang memberikan pinjaman, seperti halnya jika terjadi pergeseran resiko (*risk shifting*) sehingga perusahaan dianggap mampu memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar disekitarnya.



Gambar 4.1 Kerangka Pemikiran

3. Hipotesis

- H₁ : Kepemilikan Institusi berpengaruh negative terhadap kebijakan pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*
- H₂ : Dewan Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap kebijakan pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.
- H₃ : Komite Audit berpengaruh positif terhadap kebijakan pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.
- H₄ : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap kebijakan pengungkapan *corporate social responsibility (CSR)*.

DESAIN DAN METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder. Objek utama penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Data diperoleh dari laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI). Data yang digunakan meliputi kepemilikan institusi, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis, hipotesis penelitian ini dikembangkan berdasarkan teori-teori yang selanjutnya diuji berdasarkan data yang dikumpulkan.

B. Definisi Operasional Variabel

1. Variabel Dependen (Variabel Terikat)

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. CSR merupakan kewajiban organisasi bisnis untuk turut serta dalam kegiatan yang bertujuan melindungi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Prasetyono, 2011). Pengungkapan CSR dinilai dengan membandingkan pengungkapan yang dilakukan perusahaan dengan jumlah pengungkapan yang disyaratkan dalam *GRI G4 Guidelines* meliputi 91 item pengungkapan: *economic, environment, labour practices, human right, society, dan product responsibility*. Apabila item informasi yang ditentukan, diungkapkan dalam laporan tahunan maka diberi skor 1, dan jika tidak diungkapkan diberi skor 0. Perhitungan indeks pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSRDIx)* dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CSRDIx} = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{91 \text{ item pengungkapan}}$$

Keterangan : 91 indikator untuk analisis laporan keuangan tahun 2014

2. Variabel Independen (Variabel Bebas)

Variabel Independen dalam penelitian ini, antara lain:

a. Kepemilikan Institusi

Variabel ini menggambarkan tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan (Siallagan dan Machfoedz, 2006). Kepemilikan institusi menunjukkan persentase saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan kepemilikan oleh *blockholder*. Variabel ini diukur dari jumlah persentase saham yang dimiliki oleh institusi pada akhir tahun. Variabel kepemilikan institusi diperoleh dari laporan keuangan pada bagian *shareholder*.

$$KI = \frac{\text{Jumlah kepemilikan institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$$

b. Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris independen, diukur dari persentase komisaris independen terhadap jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris (Lastanti, 2004)

$$DKI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$$

c. Komite Audit

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep – 29/ PM/ 2004 Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya. Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12- 2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa : Jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Komite audit. Anggota Komite Audit yang berasal

dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang.

d. Ukuran Perusahaan

Wang, & Song (2011) menyatakan bahwa semakin besar suatu perusahaan akan semakin disorot oleh para *stakeholder*. Pada penelitian ini ukuran perusahaan dinyatakan dengan total aset milik perusahaan yang sudah terdaftar di BEI dalam jutaan rupiah (Wijaya, 2012)

$$UP = \text{Log (nilai buku total asset)}$$

Tabel 3.1
Tabel Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator
1	Corporate Social Responsibility	Jumlah item yang diungkapkan $CSRDix = \frac{\text{Jumlah item yang diungkapkan}}{\text{91 item pengungkapan}}$ Keterangan : 91 indikator untuk analisis laporan keuangan mulai tahun 2014
2	Kepemilikan Institusi	Jumlah kepemilikan institusi $KI = \frac{\text{Jumlah kepemilikan institusi}}{\text{Jumlah saham yang beredar}} \times 100\%$
3	Dewan Komisaris Independen	Jumlah komisaris independen $DKI = \frac{\text{Jumlah komisaris independen}}{\text{Jumlah dewan komisaris}} \times 100\%$
4	Komite Audit	Berdasarkan Surat Edaran dari Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No. SE-008/BEJ/12- 2001 tanggal 7 Desember 2001 perihal keanggotaan komite audit, disebutkan bahwa : Jumlah anggota Komite Audit sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang, termasuk Ketua Komite audit. Anggota Komite Audit yang berasal dari komisaris hanya sebanyak 1 (satu) orang.
5	Ukuran Perusahaan	$UP = \text{Log (nilai buku total asset)}$

C. Populasi dan Penentuan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang *listing*

di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 - 2015. Metode pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel secara tidak acak yang mempunyai tujuan atau target tertentu (Indriantoro, 1999), data yang digunakan perusahaan manufaktur yang memenuhi kriteria pemilihan sampel. Adapun kriteria sampel sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 & 2015
2. Perusahaan yang memisahkan saham yang dimiliki oleh manajemen *ownership* maupun institusi investor.
3. Perusahaan tersebut memiliki dewan komisaris dan komite audit.
4. Perusahaan yang memiliki data tentang laporan keuangan keuangan secara lengkap (sesuai yang dibutuhkan dalam proses penelitian).
5. Adapun data yang diperoleh adalah 53 sample yang telah sesuai dengan kriteria, adapun 53 sample tersebut sesuai yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 3.2
Sample Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia	141
2	Perusahaan yang memiliki Kepemilikan Instiusi	109
3	Perusahaan yang memiliki Dewan Komisaris Independen	105
4	Perusahaan yang memiliki Komite Audit	103
5	Perusahaan yang memiliki dalam Annual report menampilkan kekayaan perusahaan	98
6	Perusahaan yang tidak mengalami Loss	78
7	Perusahaan yang menggunakan rupiah sebagai mata uang dalam annual reportnya	53
8	Jumlah sample perusahaan yang memenuhi kriteria	53

Tabel 3.3
Daftar Anggota Sample

Sampel	Kode	Nama Perusahaan
1	INTP	PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
2	SMBR	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk
3	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
4	WTON	PT Wijaya Karya Beton Tbk
5	AMFG	PT Asahimas Flat Glass Tbk
6	ARNA	PT Arwana Citramulia Tbk
7	MLIA	PT Mulia Industrindo Tbk
8	TOTO	PT Surya Toto Indonesia Tbk
9	ALKA	PT Alakasa Industrindo Tbk
10	BTON	PT Betonjaya Manunggal Tbk
11	LION	PT Lion Metal Works Tbk
12	DPNS	PT Duta Pertiwi Nusantara Tbk
13	EKAD	PT Ekadharna International Tbk
14	SRSN	PT Indo Acidatama Tbk
15	AKPI	PT Argha Karya Prima Industry Tbk
16	APLI	PT Asioplast Industries Tbk
17	IGAR	PT Champion Pacific Indonesia Tbk
18	TALF	PT Tunas Alfin Tbk
19	TRST	PT Trias Sentosa Tbk
20	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
21	TIRT	PT Tirta Mahakam Resources Tbk
22	FASW	PT Fajar Surya Wisesa Tbk
23	ASII	PT Astra International Tbk
24	INDS	PT Indospring Tbk
25	NIPS	PT Nipress Tbk
26	SMSM	PT Selamat Sempurna Tbk
27	RICY	PT Ricky Putra Globalindo Tbk
28	TRIS	PT Trisula International Tbk
29	JECC	PT Jembo Cable Company Tbk
30	KBLM	PT Kabelindo Murni Tbk
31	SCCO	PT Supreme Cable Manufacturing and Commerce Tbk
32	DLTA	PT Delta Djakarta Tbk
33	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
34	MYOR	PT Mayora Indah Tbk

35	ROTI	PT Nippon Indosari Corpindo Tbk
36	SKBM	PT Sekar Bumi Tbk
37	SKLT	PT Sekar Laut Tbk
38	ULTJ	PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk
39	GGRM	PT Gudang Garam Tbk
40	HMSP	PT HM Sampoerna Tbk
41	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
42	MERK	PT Merck Tbk
43	PYFA	PT Pyridam Farma Tbk
44	TSPC	PT Tempo Scan Pacific Tbk
45	TCID	PT Mandom Indonesia Tbk
46	CINT	PT Chitose Internasional Tbk
47	KDSI	PT Kedawang Setia Industrial Tbk
48	LMPI	PT Langgeng Makmur Industri Tbk
49	BRNA	PT Berlina Tbk
50	AUTO	PT Astra Otoparts Tbk
51	PICO	PT Pelangi Indah Canindo Tbk
52	AISA	PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk
53	IMPC	PT Impack Pratama Industri Tbk

D. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa Laporan Tahunan Perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Laporan tersebut diperoleh melalui *website* resmi masing-masing perusahaan dan/atau BEI melalui internet dengan alamat www.idx.co.id maupun melalui perantara peranan pojok BEI Universitas Mercu Buana Jakarta. Data yang dikumpulkan dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*. Kuncoro, mudrajad (2001) menyatakan bahwa data sekunder biasanya dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.

E. Metode Analisis

1. Analisis Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan variabel utama keuangan yang diungkapkan perusahaan dalam bentuk grafik dalam laporan tahunan 2014. Statistik deskriptif yang digunakan antara

lain: *mean, median, minimum, dan standard deviation.*

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan variable independen dalam menjelaskan variasi variable dependen. Jika nilai *Adjusted R²* adalah sebesar 1 berarti fluktuasi variable dependen seluruhnya dapat dijelaskan oleh variable independen dan tidak ada faktor lain yang menyebabkan fluktuasi variable dependen.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis mengenai pengaruh kepemilikan manajemen, kepemilikan institusi, dewan komisaris independen, komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda (multiple regression) karena menggunakan variabel independen lebih dari satu. Model persamaan yang dibuat adalah :

$$CSR_{it} = \beta_0 + \beta_1 X_{1_KIit} + \beta_2 X_{2_DKIit} + \beta_3 X_{3_KAit} + \beta_4 X_{4_UKit} + \mu_{it}$$

Keterangan :

- CSR_{it} = Corporate Social Responsibility (CSR)
- X_{1_KI} = Kepemilikan Institusi
- X_{2_DKI} = Dewan Komisaris Independen
- X_{3_KA} = Komite Audit
- X_{4_UK} = Ukuran Perusahaan
- β₀ = Konstanta
- μ = error
- i = I tahun unit cross sectional (1,2,3)

A. Uji signifikan simultan (uji statistic F)

Uji F menunjukkan apakah semua variable independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Ghozali, 2006). Untuk

pengujiannya dilihat dari nilai profitabilitas (p value) yang terdapat pada table Anova nilai F dari output program aplikasi SPSS, dimana jika profitabilitas (P value) < 0.05, maka secara simultan keseluruhan variabel memiliki pengaruh secara bersama-sama pada tingkat yang signifikan 5%.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan permasalahan dan tujuan penelitian, maka data yang telah diperoleh akan dianalisis secara keseluruhan, perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dengan jumlah pengamatan sebanyak 106 yang terdiri dari 53 perusahaan manufaktur yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia tahun 2014 sampai 2015. Penentuan sampel sebanyak 106 perusahaan didasarkan pada periode yang mulai *listed* pada 2014 dan 2015 dan sesuai dengan criteria yang telah ditentukan oleh peneliti.

Penelitian hanya menggunakan sampel dua tahun dikarenakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang terbaru, resmi keluar dan digunakan sejak bulan Maret 2013, sehingga laporan keuangan *annual report* didalam Bursa Efek Indonesia yang bisa digunakan sejauh ini hanya tahun 2014 dan 2015 yaitu sebanyak 91 item komponen pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

A. Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan suatu gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, maksimum, rata – rata (mean), standar deviasi dari masing – masing variable penelitian. Analisis data penelitian dilakukan pada 53 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2014 dan 2015.

Tabel 4.1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y_CSR	106	.099	.527	.22183	.111566
X1_KI	106	.014	.994	.49786	.266517
X2_DKI	106	0.000	.750	.37918	.102945
X3_KA	106	.301	.699	.50285	.060886
X4_UK	106	.111	.144	.12279	.007317
Valid N (listwise)	106				

B. Uji Hipotesis

Dalam analisis ini digunakan persamaan regresi sebagai berikut :

$$CSR_{it} = b_0 + b_1 X1_KI_{it} + b_2 X2_DKI_{it} + b_3 X3_KA_{it} + b_4 X4_UK_{it} + e$$

Dimana :

CSR_{it} = Corporate Social Responsibility

X₁_KI = Kepemilikan Institusi

X₂_DKI = Dewan Komisaris Independen

X₃_KA = Komite Audit

X₄_UK = Ukuran Perusahaan

i = I tahun unit cross sectional

t = tahun periode waktu

e = Error

Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian ini, maka hasil SPSS diperoleh sebagaimana pada table Model Summary, table Anova dan table Coefficients berikut ini :

Tabel 4.4
Model Summary Hasil Simulasi SPSS
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.541 ^a	.292	.264	.095686	1.733

a. Predictors: (Constant), X4_UK, X1_KI, X2_DKI, X3_KA

b. Dependent Variable: CSR

Adjusted R Square sebesar 0.264 relatif kecil yang menunjukkan bahwa regresi ini tidak berpola secara linier karena pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* bukan hanya dipengaruhi oleh fundamental perusahaan akan tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi eksternal perusahaan. Hasil estimasi yang diperoleh dari model regresi ini menggambarkan bahwa secara linear hanya mampu mendekati kenyataan atau fenomena tersebut sebesar 26.4% karena pada dasarnya penentu faktor pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* itu sendiri banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal dalam perusahaan, termasuk seperti politik, bencana alam, hubungan social, kebijakan perusahaan termasuk kebijakan moneter, dan informasi lainnya yang berkembang dimasyarakat yang diprediksi mampu mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* itu sendiri.

Tabel 4.5
Anova Hasil Simulasi SPSS

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	.382	4	.096	10.436	.000 ^b
	Residual	.925	10	.0925		
	Total	1.307	14			

a. Dependent Variable: Y_CSR
b. Predictors: (Constant), X4_KI, X1_DKI, X2_KA, X3_UK

Dalam hubungan antara variable dependen yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan variable independent kepemilikan institusi, dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan secara serempak memiliki hubungan yang signifikan, sebagaimana tabel

ANOVA atau *analysis of variance* dengan nilai $F = 10.436$ dan tingkat sig = 0.00%. dari data angka residual tersebut diatas menunjukkan adanya faktor eksternal maupun internal lainnya diluar variabel yang diamati yang mampu mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* seperti halnya faktor hubungan sosial antara perusahaan dengan lingkungan sekitar, dengan semakin baiknya hubungan sosial antara perusahaan dengan lingkungan dan masyarakat termasuk konsumen, hal ini akan menambah tingkat kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Oleh sebab itu banyak faktor-faktor yang harus diperhatikan lagi dalam penentuan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* suatu perusahaan, melihat pengungkapan itu sendiri dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal.

Tabel 4.6
Coefficients Hasil Simulasi SPSS

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.574	.165	3.471	.001
	X1_KI	.075	.035	-1.798	.037
	X2_DKI	.150	.093	-1.394	.108
	X3_KA	.165	.166	-.090	.990
	X4_UK	7.920	1.351	.519	5.861

a. Dependent Variable: CSR

Selanjutnya, secara parsial tingkat signifikansi pengaruh masing-masing variabel independent terhadap variabel dependen atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* perusahaan tercermin pada uji statistik t atau t-hitung sebagaimana tabel *coefficients*.

Hasil studi sebagaimana tabel *coefficients*, menunjukkan bahwa hanya ada dua variabel yang memiliki hubungan yang sangat signifikan terhadap variabel dependent *Corporate Social Responsibility (CSR)* yaitu kepemilikan institusi dan ukuran perusahaan dengan tingkat signifikan masing-masing 0,037 dan 0,00 sekian. Sedangkan dua variabel lainnya yaitu dewan komisaris independen dan komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependent *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan tingkat sig 0,108 dan 0.324

1. Kepemilikan Institusi

Hasil yang diperoleh dari variable independent Kepemilikan Institusi yang diproxy dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Menunjukkan pengaruh negatif terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang diamati, namun pengaruhnya signifikan sebagaimana pada uji-t statistik diperoleh dari t hitung dengan angka -2,118 atau dengan tingkat signifikan 0.037 dan dengan kata lain tingkat toleransi yang mencapai 3.7%.

Pada persamaan regresi diatas dapat kita lihat bahwa nilai *Unstandardized Coefficients B* sebesar - 0,075 yang berarti bahwa jika variabel independen dalam hal ini kepemilikan institusi bertambah satu maka variabel dependen *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan berkurang sebesar 0.075 dari nilai sebelumnya, yang mana hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya kepemilikan institusi maka akan memperkecil pengungkapan *CSR*, begitu juga sebaliknya semakin sedikit kepemilikan institusi pada suatu perusahaan maka tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan semakin bertambah.

2. Dewan Komisaris Independen

Hasil yang diperoleh dari variabel independent dewan komisaris independen yang diproxy dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menunjukkan pengaruh negatif, tetapi pengaruhnya tidak signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagaimana pada uji-t statistik yang diperoleh dari t hitung dengan angka -1.624 atau dengan tingkat signifikan yang mencapai 0.108 atau dengan kata lain tingkat toleransi kesalahan mencapai 10.8%.

Pada persamaan regresi diatas dapat kita lihat bahwa nilai *Unstandardized Coefficients B* sebesar - 0,150 yang berarti bahwa jika variabel independen dalam hal ini dewan komisaris independen bertambah satu maka variabel dependen *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan berkurang sebesar 0.150 dari nilai sebelumnya, yang mana hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya dewan komisaris independen maka akan memperkecil pengungkapan *CSR*, begitu juga sebaliknya semakin sedikit dewan komisaris independen pada suatu perusahaan menurut persamaan dan simulasi SPSS diatas juga tidak berpengaruh dengan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

3. Komite Audit

Dari hasil penelitian ini diperoleh bahwa komite audit yang diproxy dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menunjukkan **komite audit tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)***.

Pada persamaan regresi diatas dapat kita lihat bahwa nilai *Unstandardized Coefficients B* sebesar - 0,990 yang

berarti bahwa jika variabel independen dalam hal ini komite audit bertambah satu maka variabel dependen *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan berkurang sebesar 0.990 dari nilai sebelumnya, yang mana hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya komite audit maka akan memperkecil pengungkapan *CSR*, begitu juga sebaliknya semakin sedikit komite audit pada suatu perusahaan menurut persamaan dan simulasi SPSS diatas hasilnya tidak berpengaruh dengan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

4. Ukuran Perusahaan

Dari hasil penelitian ini diperoleh dari variabel independent yaitu ukuran perusahaan yang diproxy dengan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* menunjukkan pengaruh negatif, tetapi pengaruhnya tidak signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagaimana pada uji-t statistik yang diperoleh dari t hitung dengan angka 5,861 atau dengan tingkat signifikan yang mencapai 0.000 atau dengan kata lain tingkat toleransi kesalahan mencapai 0.00%. dengan demikian dapat dijelaskan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pada persamaan regresi diatas dapat kita lihat bahwa nilai *Unstandardized Coefficients B* sebesar 7.920 yang berarti bahwa jika variabel independen dalam hal ini ukuran perusahaan bertambah satu maka variabel dependen *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan bertambah sebesar 7.920 dari nilai sebelumnya, yang mana hal ini menandakan bahwa semakin banyaknya kekayaan perusahaan maka akan memperbanyak juga tingkat pengungkapan *Corporate*

Social Responsibility (CSR), begitu juga sebaliknya semakin sedikit komite audit pada suatu perusahaan menurut persamaan dan simulasi SPSS maka dapat dijelaskan semakin kecil juga tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

C. Pembahasan

1. Pengaruh Kepemilikan Institusi Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Kepemilikan institusi pada dasarnya mempunyai peran penting dalam penentuan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* termasuk dalam memberikan masukan atas anggaran biasa *CSR* yang akan dikeluarkan oleh perusahaan, dan juga dalam jangka panjang kepemilikan institusi selalu berfikir agar perusahaan dimana sahamnya berada selalu mendapatkan laba yang maksimal dan sesuai target, hingga akhirnya terkadang mereka lupa bahwa pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga perlu diperhatikan, selain karena fokus terhadap peningkatan target laba perusahaan pihak kepemilikan institusi juga selalu berupaya untuk menekan biaya demi menjaga kestabilan rasio antara omset dengan biaya, oleh sebab itu semakin banyak pihak institusi yang memiliki saham dalam suatu perusahaan maka akan mengakibatkan semakin kecil pula tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Kepemilikan saham instusi yang semakin banyak cenderung akan menyebabkan sedikitnya tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* dalam suatu perusahaan, hal ini dapat dilihat dari sampel yang ada yaitu perusahaan Tunas Alfin Tbk yang mana kepemilikan institusi pada perusahaan tersebut bisa dibilang cukup tinggi dibanding Semen Indonesia Tbk, sehingga menyebabkan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang sangat kecil, oleh sebab itu dalam hal ini faktor

kepemilikan institusi perlu menjadi pertimbangan bagi suatu perusahaan dalam melaksanakan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang lebih baik. Hal ini didukung dengan pernyataan Sembiring (2003) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh publik berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggungjawab sosial perusahaan. Sedangkan Prayogi (2003) menyatakan bahwa semakin besar persentase kepemilikan publik semakin luas dalam pengungkapan sukarela dalam laporan keuangan tahunan, sebab perusahaan perusahaan dalam hal ini cenderung lebih mampu mempertimbangkan dalam pemberian manfaat bagi lingkungan sekitarnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kepemilikan Institusi Mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

2. Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Dewan komisaris independen juga mempunyai tanggungjawab untuk menjaga kestabilan laba perusahaan, sehingga perlu bagi mereka untuk meminimalisir setiap biaya yang dikeluarkan mulai biaya gaji, *advertising* operasional, bahan baku termasuk biaya atas kegiatan tanggungjawab sosial atau *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang akan dikeluarkan oleh suatu perusahaan. Sebab kinerja seorang dewan komisaris pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa besar tingkat persentase laba yang dihasilkannya oleh suatu perusahaan, oleh sebab itu, dalam hal ini dewan komisaris independen tidak terlalu berpengaruh bagi perusahaan dalam proses pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Namun itu semua bertolak belakang dengan pernyataan Charlie Weir, *et al* (2000) menganggap komisaris yang independen sama dengan direktur non-eksekutif. Ada

peran yang memediasi hubungan antara manajer, auditor dan pemegang saham. Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa *non-executive director* (komisaris independen) dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi diantara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi serta memberikan nasihat kepada direksi. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

3. Pengaruh Komite Audit Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Komite audit dalam perusahaan pada dasarnya mempunyai fungsi paham manajemen dalam meminimalisir biaya termasuk biaya yang berkaitan dengan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* itu sendiri, hal ini disebabkan karena komite audit pada dasarnya cenderung melakukan pengamatan terhadap biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, termasuk biaya untuk kegiatan tanggungjawab sosial, Menurut Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-41/PM/2003 dikatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, sedangkan dalam kenyataannya dewan komisaris selalu lebih cenderung berusaha meminimalisir biaya demi meningkatkan laba suatu perusahaan, oleh sebab itu semakin banyak jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, maka tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* akan semakin kecil. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa Komite Audit tidak mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility*

Pada dasarnya setiap perusahaan dengan tingkat kekayaan yang tinggi cenderung lebih mudah dan tidak terlalu enggan untuk mengeluarkan biaya demi menjaga kepercayaan konsumen termasuk dalam menjaga persentase laba perusahaan, hal ini berbeda halnya dengan perusahaan yang hanya memiliki tingkat kekayaan yang rendah, mereka cenderung berfikir dua kali dalam mengeluarkan biaya-biaya yang dianggap mampu memperkecil laba perusahaan. Dalam persamaan regresi diatas dalam ditarik penjelasan bahwa tingkat ukuran perusahaan menjadi faktor penting dalam penentuan pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, sebagaimana diri kita sendiri saat memiliki banyak harta tidak jarang lebih murah hati kepada mereka yang membutuhkan pertolongan, begitu sebaliknya, disaat kita tidak banyak memiliki rejeki maka akan cenderung berfikir dua kali dalam mengeluarkan biaya yang dianggap kurang berpengaruh dalam kehidupan saat itu, oleh sebab itu dalam hal ini ukuran perusahaan sangat mempunyai pengaruh dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Hal ini didukung dengan pernyataan Kieso (219:2001) aktiva adalah manfaat ekonomi yang mungkin diperoleh dimasa depan atau dikendalikan oleh etitas tertentu sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu. Aktiva tetap mempunyai pengaruh positif dengan *leverage*, karena aktiva tetap dapat dipergunakan sebagai jaminan sehingga dapat meminimalkan konflik antara pemegang saham dan kreditur (Megginson, 1997). Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran perusahaan mempunyai pengaruh terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan diatas dan hasil analisis persamaan regresi maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kepemilikan institusi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dengan demikian kepemilikan institusi harus menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang akan dikeluarkan.
2. Dewan komisaris independen tidak mempunyai tingkat pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
3. Komite audit tidak mempunyai tingkat pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.
4. Ukuran perusahaan dalam hal ini sangat mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sehingga perlu menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam menentukan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang akan dikeluarkan.

B. Implikasi dan Saran

Berdasarkan uraian diatas, maka implikasi dan saran yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Implikasi dari penelitian yaitu perusahaan yang diamati untuk pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebaiknya lebih mempertimbangkan kelebihan yang didapat jika CSR

dilaksanakan dengan baik, apalagi terhadap karyawan dan lingkungan sekitar, terlebih perusahaan dengan skala besar cenderung membawa limbah yang besar pula, oleh sebab itu hubungan yang baik dengan masyarakat dan lingkungan dalam hal ini harus lebih diperhatikan, termasuk kepentingan pihak manajemen dalam memaksimalkan laba hendaknya perlu diimbangi dengan tingkat pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang lebih baik pula, selain dapat menjaga tingkat kepercayaan konsumen dan keharmonisan lingkungan perusahaan, pada hakikatnya *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga mampu membawa kenyamanan bagi karyawan dalam melaksanakan pekerjaan.

2. Kebijakan *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang dikeluarkan oleh pemegang saham institusi sebaiknya perlu lebih diperhatikan, mengingat pihak institusi memiliki tujuan untuk meningkatkan laba perusahaan, meskipun tingkat kinerja pihak kepemilikan institusi dapat dilihat dari tingkat laba yang diperoleh oleh perusahaan, namun ada kalanya biaya untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga harus diperhatikan, dalam hal ini agar tingkat kepercayaan konsumen perusahaan bisa semakin bertambah serta mampu meningkatkan target laba yang diharapkan.
3. Komite audit dan dewan komisaris pada dasarnya mempunyai tugas yang hampir sama, yaitu komite audit juga mempunyai tugas membantu dewan komisaris dalam meningkatkan laba perusahaan, dalam hal ini dewan komisaris juga harus dapat memberi saran dalam meminimalisir biaya-biaya yang

akan dikeluarkan dengan cara mengaudit setiap beban yang dikeluarkan, disamping itu tanpa mengurangi tugas dan fungsi komite audit, biaya yang dikeluarkan dalam proses pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* juga harus dipertimbangkan, tidak bisa hanya dikatakan hal yang biasa sebab dalam kenyataannya kegiatan tanggungjawab sosial sering membawa dampak positif dalam kelangsungan hidup perusahaan.

4. Setiap perusahaan dalam mengeluarkan biaya selalu berpaku pada anggaran yang telah disusun setiap tahunnya, namun bagi perusahaan dengan skala besar sudah seharusnya mampu mengeluarkan biaya tanggungjawab sosial yang besar pula, sebab hal ini harus sebanding dengan tingkat limbah yang dikeluarkan dari hasil proses kegiatan perusahaan, mulai dari limbah sampah, air, maupun udara. Namun bukan berarti bagi perusahaan dengan tingkat ukuran perusahaan yang tidak terlalu besar maka tidak mengeluarkan biaya tersebut, mereka juga harus tetap mengeluarkan biaya tanggungjawab sosial namun menyesuaikan dengan skala yang lebih kecil pula namun tetap sebanding dengan limbah yang dihasilkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad Nurkhin, 2010. "Corporate Governance dan Profitabilitas, Pengaruhnya terhadap Pengungkapan CSR Sosial Perusahaan. Jurnal Dinamika Akuntansi. Vol. 2 No. 1, Maret 2010. Universitas Negeri Semarang.
- Ali Darwin, 2004. "Penerapan Sustainability

- Reporting di Indonesia". *Konvensinasional Akutansi V, Program Profesi lanjutam*. Yogyakarta, 13-15 Desember
- Angel Dwi Karina, Lovink. Dkk. 2013. "Analisis factor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan CSR" *Diponegoro Journal Of Accounting* Volume 02, No 02, Tahun 2013 Halaman 01, ISSN (Online) 2337-3806
- Beets, S. Douglas and Christopher C. Souther. 1999. "Corporate Environmental Reports: the Need for Standards and an Environmental Assurance service". *Accounting Horizons*. Vol13, no.2, p.129-145.
- Belkaoui, Ahmed and Philip G. Karpik. 1989. "Determinantsof the Corporate Decision To Disclose Sosial Information". *Accounting, auditing and Accountability Journal*. Vol.2, No.1, p.36-51
- Burritt, Roger L and Stephen Welch. 1997. "Accountability for Environmental Performance of the Australian Commonwealth Public Sector". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No.4, p.532-562
- Chwastiak, Michele. 1999. "Deconstructing the Pincipal-Agent Model: a View from The bottom". *Critical perspectives on Accounting*. Vol. 10, p.425-441
- Deegan, Craig and Michaela Rankin. 1997. "The Materiality of Environmental Information tu Users of Annual Reports". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol.10, No.4, p.562-584
- Desi Ariani, Ratna & Juniati Gunawan 2014. "Pengaruh Pengungkapan *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan perbankan" e-Journal Magister Akuntansi Trisakti Volume 1 No 2 September 2014 Hal 181-198.
- Dita Utari, 2014. "Analisis Pengaruh Kriteria *Good Corporate Governance* Terhadap Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* Pada Perusahaan Sub-Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia" *Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura* Vol. 3, No. 1, Agustus 2014 Hal. 53-80
- Eipstein, Marc J. and Martin Freedman. 1994. "Sosial Disclosure and the Individual Investor". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol.7, No.4, p.94-108
- Ema. 2004. "Penerapan Sustainability Reporting di Indonesia" *Konvensi nasional akutansi V, program provesi lanjutan*. Yogyakarta, 13-15-Desember.
- Fitriany. 2001. "Signifikansi Perbedaan Tingkat kelengkapan Pengungkapan Wajib dan Sukarela pada laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta" *Simposium Nasional Akuntansi IV*. Bandung. 30-31 Agustus.
- Hackston, David and Markus J. Milne. 1996. "Some Determinants of Social and Environmental Dislosure in New Zealand Companies". *Accounting, Auditing And Accountability Journal*. Vol.9, No.1, p.77-108
- Gallhover, Sonjaan djim Haslam. 1997. "The Direction of Green Accounting Policy: Critical Reflections". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol.10, No.2, p.148-174.

- Gray, Rob: "Colin Dey: Dave Owen: Richard Evans and Simon Zadek. 1997. *Struggling With the Praxis of Social Accounting: Stakeholders, Accountability, Audits and Procedures*". *Accounting, auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 3, p. 325-364
- Hackston, David and Markus J. Milne. 1996. "Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies". *Accounting, Auditing And Accountability Journal*. Vol. 9, No. 1, p. 77-108.
- Hair, Joseph H., "Rolph Anderson, Ronald L. Tatham dan William C. Black. 1998. *Multivariate Data Analysis*". Edisi 5. Newersey: Prentice Hall.
- Hughes II, K.E. 2000. "The Value Relevance of Non Financial Measures of air Pollution In the Electric Utility Industri". *The Accounting Review*. Vol. 75, No. 2, p. 209-228.
- Irawan, R. 2008. "*Corporate Social Responsibility: Tinjauan Menurut Peraturan Perpajakan di Indonesia*". [http://lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/KT8 .pdf](http://lpks1.wima.ac.id/pphks/accurate/makalah/KT8.pdf).
- Jensen, G., D .Solberg, and T. Zorn. 1992. "Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividen Policies". *Journal of Financial and Quantitative Analysis*. 27, 247-263
- Jensen, M, C, and Meckling. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs dan Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Vol 3, p. 305-360. Jogensen, Bjorn N. and Michael T. Kischen heiter. 2003. Discretionary Risk. Disclosure. *The Accounting Review*. Vol. 78, No. 2, P. 449-469.
- Komar, 2004. "Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial (Social Responsibility Accounting) dan Korelasinya dengan Islam". *Media Akutansi*. Edisi 42/Tahun XI, hal. 54-58.
- Lehman, Glen. 1999. *Dislosing New Worlds: A Role for Social and Environmentsl Accounting and Auditing*. Accounting organizations and Society. Vol. 24, p. 217-241
- Lewis, Linda and Jeffry Unirman. 1999. "Ethical Relativism: A Reason for Differences in Corporate Social Reporting". *Critical Perspective Accounting*. Vol. 10, p. 521-547.
- Majidah, dkk. 2014. "Faktor - Faktora yang mempengaruhi pengungkapan tanggungjawab social pada perusahaan" Universitas Telkom.
- Mangos, Nicholas C. and Neil R. Lewis. 1995. "A Socio- Economic paradigm for Analysing Managers' Accounting Choice Behavior". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8, No. 1 p. 38-62.
- Marwata. 2001. "Hubungan Antara Karakteristik Perusahaan dan Kualitas Ungkapan Sukarela dalam Laporan Tahunan Perusahaan Publik di Indonesia". *Symposium Nasional Akuntansi IV*. Bandung. 30-31 Agustus.
- Mathews, M, r. 1997. "Twenty- Five Years of Social and Environmental Accounting Research: Is the real Silver Jubilleto Celebrate?" *Accounting, auditing and Accountability Journal*. Vol. 10, No. 4, p. 481-531.
- Mentri BUMN. (2002). *Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-01/MBU/2011*
- Owen, David. 2005. "CSR After Enron:

A role for the Academic Accounting Provision?”. Working Paper. Sosial Sciene Research Network.

Suharto, 2004. “Standar Akuntansi Lingkungan: Kebutuhan Mendesak” *Media Akuntansi*. Edisi 42/Tahun XI, hal.4-5.

Yaparto, Marisa. Dkk. 2013. “Pengaeuh *Corporate Social Responsibility* terhadap kinerja keuangan pada sector manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2010-2011” *Journal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya Vol. 02 No. 01*.

Zeghal, Daniel and Sandrudin A. Ahmed. 1990. “Comparison of Social Responsibility Information Disclosure Media Used by Canadian Firms”. *Acconding, Auditing And accountability Journal*. Vol. 3, No.1, p.38-53.